



RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2016-2021

NAWACITA

JAMBI TUNTAS

TERTIB,
UNGGUL,
NYAMAN,
TANGGUH,
ADIL
SEJAHTERA

2
0
2
1

BAIK

BERDAYAGUNA
AKUNTABEL
INOVATIF
KREATIF

Verifikasi



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI

2018



SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWACITA)

VISI

MISI

AGENDA PRIORITAS

- | No | SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA) |
|----|--|
| 1 | MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA. |
| 2 | Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya. |
| 3 | MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN. |
| 4 | Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. |
| 5 | MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA. |
| 6 | Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. |
| 7 | MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK. |
| 8 | Melakukan revolusi karakter bangsa. |
| 9 | MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA. |



VISI JAMBI TUNTAS

TERTIB,
UNGGUL,
NYAMAN,
TANGGUH,
ADIL
SEJAHTERA
2021



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP, MA
Gubernur Jambi



DR. Drs. H. FACHRORI UMAR, M.Hum
Wakil Gubernur Jambi

MISI

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesetaraan hukum
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Jambi periode 2016 - 2021 yaitu **Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS)**, serta implelementasi dari Program **NAWACITA**. Visi Gubernur Jambi tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mendukung Visi Gubernur Jambi sesuai dengan TUPOKSI dari masing-masing OPD, yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk mendukung tercapainya Visi Gubernur Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi yang dibentuk Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Balitbangda telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen pelaksanaan Program dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Periode 2016- 2021 dalam mendukung dan mendorong pembangunan di Provinsi Jambi yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, disamping sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kelitbang.

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi disusun dapat diukur melalui indikator kinerja dari sasaran. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah Indikator Kinerja Balitbangda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Jumlah Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang tertuang pada Renstra sebelum direvisi sebanyak 3 (tiga) indikator. Hasil evaluasi Renstra 2016-2021 yang dilaksanakan tahun 2017 terdapat hal-hal sebagai berikut : 1. Terdapat Indikator Kinerja yang belum sesuai dengan TUPOKSI Balitbangda Provinsi Jambi; dan 2. Belum sesuaiya Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi dengan Indikator Kinerja Utama Gubernur Jambi dalam mendukung Visi Gubernur Jambi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, mulai tahun 2018 Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi berubah menjadi : Jumlah Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi ditetapkan yang sesuai dengan TUPOKSI serta dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Jambi sesuai RPJMD Jambi yang telah direvisi menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi.

Demikian Revisi Renstra 2016-2021 ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh insan Balitbangda Provinsi Jambi dengan BAIK.

Jambi,

**KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI JAMBI**

Ir. A Z R I N, M.Si
NIP. 19660224 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMB	7
2.1 Tugas dan Fungsi Balitbangda dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Balitbangda	14
2.3 Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran Balitbangda	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda	18
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .	20
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Renstra K/L	23
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	25
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	27
4.1 Visi dan Misi Balitbangda Provinsi Jambi	27
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	28
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	31
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF.....	33
BAB 6 INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD	47
BAB 7 PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.	Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	7
TABEL 2.2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan dan Pendidikan	14
TABEL 2.3.	Perlengkapan dan Aset yang dikelola Balitbangda Jambi Tahun 2016	14
TABEL 2.4.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi ..	15
TABEL 2.5.	Capaian Kinerja antara Renstra dengan RPJMD	16
TABEL 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi	20
TABEL 3.2.	Komperasi Capaian Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L	24
TABEL 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi	28
TABEL 4.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Stategi Balitbangda Provinsi Jambi	30
TABEL 5.1.	Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Balitbangda Provinsi Jambi	34
TABEL 5.2.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Balitbangda Provinsi Jambi	39
TABEL 6.1.	Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang mengacu pada Sasaran RPJMD	46

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1.	Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	13
-------------	--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Persoalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah, selalu muncul dalam berbagai permasalahan yang menuntut kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan seyogyanya merupakan kebijakan yang telah didasari atas pertimbangan yang rasional, matang dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut menjadikan kita untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis tersebut, hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan pembangunan daerah.

Hal di atas sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa : *“Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan IPTEK di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK”*. Dalam kapasitas ini, Pasal 21 Ayat (40), kembali ditegaskan bahwa : *“Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja Pemerintah Daerah”*.

Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Provinsi Jambi tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional karena Provinsi Jambi merupakan bagian integral dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan IPTEK di Provinsi Jambi harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan juga tidak terlepas dari arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi.

Visi pembangunan IPTEK nasional sampai tahun 2025 adalah “IPTEK sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Visi tersebut dijabarkan dalam 6 misi, yaitu : 1) Menempatkan IPTEK sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan; 2) Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan IPTEK; 3) Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global; 4) Meningkatkan difusi IPTEK melalui pemanfaatan jaringan pelaku dan kelembagaan IPTEK termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi IPTEK; 5) Mewujudkan SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan IPTEK yang berkualitas dan kompetitif, dan 6) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Lembaga litbang pemerintah daerah adalah institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melakukan aktivitas riset. Salah satu institusi litbang yang lahir mengiringi diberlakukannya era otonomi daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

Menyadari peran penting Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi dengan Kategori Tipe A yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dibutuhkan suatu rencana pembangunan lima tahun ke depan yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan arah penyelenggaraan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan daerah yang berbasis inovasi daerah serta penerapan IPTEK dalam pembangunan Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi perlu menyusun rencana strategi, kebijakan, dan program kerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi, termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di dalamnya. Renstra sebagai suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Berkaitan Renstra ad

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan dan merumuskan arah kebijakan serta indikasi program/kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan IPTEK serta Inovasi dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021, dan sebagai salah satu acuan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menyusun program kegiatan mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Daerah Pembangunan IPTEKIN Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 selain mengacu pada Nawacita dan RPJMD Provinsi Jambi.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 12. Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 16. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Dewan Riset Nasional;
 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Oprasional Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M.Kp/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK 2005-2009;
26. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 89/M.Kp/V/2005 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Riset Nasional 2005-2008;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJP 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
31. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
32. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Daerah Pembangunan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Provinsi Jambi Tahun 2017-2021;
33. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 327 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Daerah Plasma Nutfah (KDPN) Provinsi Jambi;
34. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra-HKI) Provinsi Jambi;
35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/36/SJ Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/7004/Sj tanggal 1 Desember 2014 tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda tahun 2015 – 2019;
37. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 341/KEP.GUB/BALITBANGDA-1/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi Masa Bkati 2016-2021;
38. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 489/KEP.GUB/BALITBANGDA-1/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 341/KEP.GUB/BALITBANGDA-1/2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi Masa Bhakti 2016-2021; dan
39. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 126/KEP.GUB/BALITBANGDA-1.3/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1165/KEP.GUB/BALITBANGDA-1/2016 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi Masa Bkati 2017-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pentingnya Renstra bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah, yang akan dijadikan acuan dalam penilaian kegiatan yang strategis bagi pimpinan organisasi dalam kurun waktu 5 tahun.

Maksud

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan mengantisipasi perubahan kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka percepatan program pembangunan, dan sebagai pedoman Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta untuk mempermudah dalam mengukur serta mengevaluasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi sehingga menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Sedangkan untuk mengakomodir kebutuhan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan isu-isu aktual dan mendesak yang diperlukan oleh pemerintah daerah akan dilakukan penelitian yang bersifat mandiri maupun penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif.

Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan SKPD selama 5 tahun, yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Aparatur Internal Balitbangda Provinsi Jambi, kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bersinergi dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.
2. Membangun sistem kerja Balitbangda Provinsi Jambi yang akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas pokok fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.
3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Balitbangda Provinsi Jambi guna meningkatkan komitmen kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Memberikan kerangka dasar dalam perumusan kebijakan, guna percepatan pencapaian program pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang logis dan utuh tentang keseluruhan isinya, Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA

Bab ini memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya Balitbangda/susunan kepegawaian dan perlengkapan, Kinerja pelayanan Balitbangda serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Balitbangda

- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
Bab ini memuat penjelasan tentang Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra, telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**
Bab ini memuat penjelasan tentang visi, misi Balitbangda, tujuan dan sasaran Jangka Menengah, strategi dan kebijakan organisasi Balitbangda.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Bab ini memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Bab ini memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VII : PENUTUP**
Bab ini Penutup, sebagai bagian akhir dari Dokumen Rencana Strategis Balitbangda 2016-2021.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Balitbangda Provinsi Jambi berdasarkan Tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Litbang dalam konteks kebijakan daerah dapat digambarkan ke dalam 4 faktor kunci fungsi kelitbang daerah, yaitu :

- 1) Mengenali masalah dan mengidentifikasi isu-isu,
- 2) pemahaman isu-isu kunci,
- 3) mendukung rencana aksi yang terpilih dan
- 4) mengevaluasi kemajuan suatu program.

Berdasarkan 4 faktor kunci tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk memberikan bukti-bukti dan informasi kepada kebijakan kepala daerah (**decision maker**) dan mendukung pengembangan pelayanan publik serta menemukan dan menguji ide-ide baru dalam rangka memperbaiki inovasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara kelembagaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) sebagai Lembaga Teknis merupakan unsur pendukung tugas Pimpinan Daerah dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Keberadaan Badan Litbang memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelenggaraan program Pemerintahan Daerah, yakni :

Peran diawal, memberikan input dalam proses penyusunan langkah-langkah atau kebijakan strategis daerah ke depan, yaitu : mengidentifikasikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat; mempersiapkan data untuk perencanaan pembangunan daerah; penyusunan skala prioritas pembangunan atau kebijakan strategis; dan asumsi-asumsi terhadap dampak pembangunan/kebijakan strategis serta evaluasi kebijakan sebelumnya untuk disempurnakan.

Peran ditengah, memberikan berbagai input/rekomendasi dalam rangka implementasi program-program daerah yang tengah berjalan. Hal ini berguna, baik sebagai kontrol maupun katalisator dalam pencapaian sasaran program.

Peran diakhir, memberikan input dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program sebagai bentuk evaluasi, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

Tabel 2.1.
Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Peran Awal	Peran Tengah	Peran Akhir
Penjabaran : 1. Memberikan input dalam proses penyusunan langkah-langkah atau kebijakan strategis daerah ke depan. 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat 3. Mempersiapkan data untuk perencanaan pembangunan daerah, penyusunan skala prioritas pembangunan atau kebijakan strategis, dan asumsi-asumsi terhadap dampak pembangunan/kebijakan strategis serta evaluasi kebijakan sebelumnya untuk disempurnakan.	Penjabaran : 1. Memberikan berbagai input/rekomendasi dalam rangka implementasi program-program daerah yang tengah berjalan. 2. Sebagai kontrol maupun katalisator dalam pencapaian sasaran program.	Penjabaran : 1. Memberikan input dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program sebagai bentuk evaluasi, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Balitbangda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
2. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan provinsi;
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
7. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada balitbangda; dan
9. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga yang berkompeten terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait permasalahan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan.

2. Bersama OPD lainnya merumuskan agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan kebijakan daerah melalui naskah akademik
3. Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik
4. Melakukan kegiatan litbang sesuai prioritas daerah dan kebutuhan litbang OPD serta lembaga litbang lingkup provinsi dan kabupaten/kota
5. Melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan holistik terhadap Pemerintah Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi masing masing jabatan eselon III pada Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Tugas : membantu badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat

Fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbang;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatannggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sosial dan Kependudukan

Tugas : melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, melaksanakan koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang sosial dan kependudukan.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Tugas : melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Inovasi dan Teknologi

Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, konfirmasi, konsultasi pelaksanaan inovasi dan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi, diseminasi kelitbangan.

Fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, rekayasa, koordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan anggaran penerapan hasil penelitian/pengkajian, rekayasa serta kooordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan anggaran kegiatan seminar/ workshop, pameran/promosi iptek, fasilitasi HKI, koordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang diseminasi kelitbangan inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa, pengembangan inovasi teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi, diseminasi kelitbangan;
- e. penyiapan bahan, penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, konfirmasi pelaksanaan penguatan kelembagaan sistem inovasi daerah (SID), penguatan kelembagaan penelitian/pengkajian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti sesuai Keputusan Ketua LIP! No. 1660/D/1999 tanggal 13 Juli 1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Penilai Jabatan Peneliti dan Keputusan Kepala LIP! No. 1661/D/1999, tanggal 13 Juli 1999 tentang Pedoman Penialian Karya Ilmiah Jabatan Peneliti.

Pengertian :

- Jabatan Peneliti: Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pejabat peneliti dalam suatu organisasi penelitian dan pengembangan
- Pejabat peneliti: Pegawai Negeri Sipil yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan peneliti dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi penelitian dan pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan
- Penelitian: Suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang

baru, membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

Tugas Utama Peneliti

1. Tugas Pokok Asisten Peneliti Muda dan Asisten Peneliti Madya :
 - Membantu merencanakan kegiatan penelitian
 - Membantu atau melakukan kegiatan penelitian sendiri di bawah bimbingan
 - Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya
2. Tugas pokok Ajun Peneliti Muda dan Ajun Peneliti Madya :
 - Merumuskan dan merencanakan kegiatan penelitian dengan bimbingan
 - Melakukan kegiatan penelitian dengan pengawasan
 - Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
3. Tugas Pokok Peneliti Muda dan Peneliti Madya :
 - Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
 - Melakukan kegiatan penelitian
 - Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
 - Membimbing dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
 - Membantu merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
4. Tugas Pokok Ahli Peneliti Muda, Ahli Peneliti Madya dan Ahli Peneliti Utama:
 - Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
 - Melakukan kegiatan penelitian
 - Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
 - Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
 - Merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan IPTEK
 - Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional

Tanggung Jawab dan Hak Peneliti

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pejabat peneliti mempunyai kebebasan mimbar ilmiah secara bertanggung jawab dan dapat memperoleh serta menggunakan data dan informasi, menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, menggunakan fasilitas dan sarana, sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pustakawan

Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Pustakawan terdiri dari :

1. Pustakawan Tingkat Terampil adalah Pustakawan yang dasar pendidikan untuk pengangkatannya pertama kali serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma II bidang lain yang disetarakan.
2. Pustakawan Tingkat Ahli adalah Pustakawan yang dasar pendidikan untuk pengangkatannya pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Perpustakaan. Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain yang disetarakan.

Tugas Pokok Pejabat Fungsional Pustakawan

Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Terampil :

1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/bahan informasi.
2. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Ahli :

1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/bahan informasi
2. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi
3. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

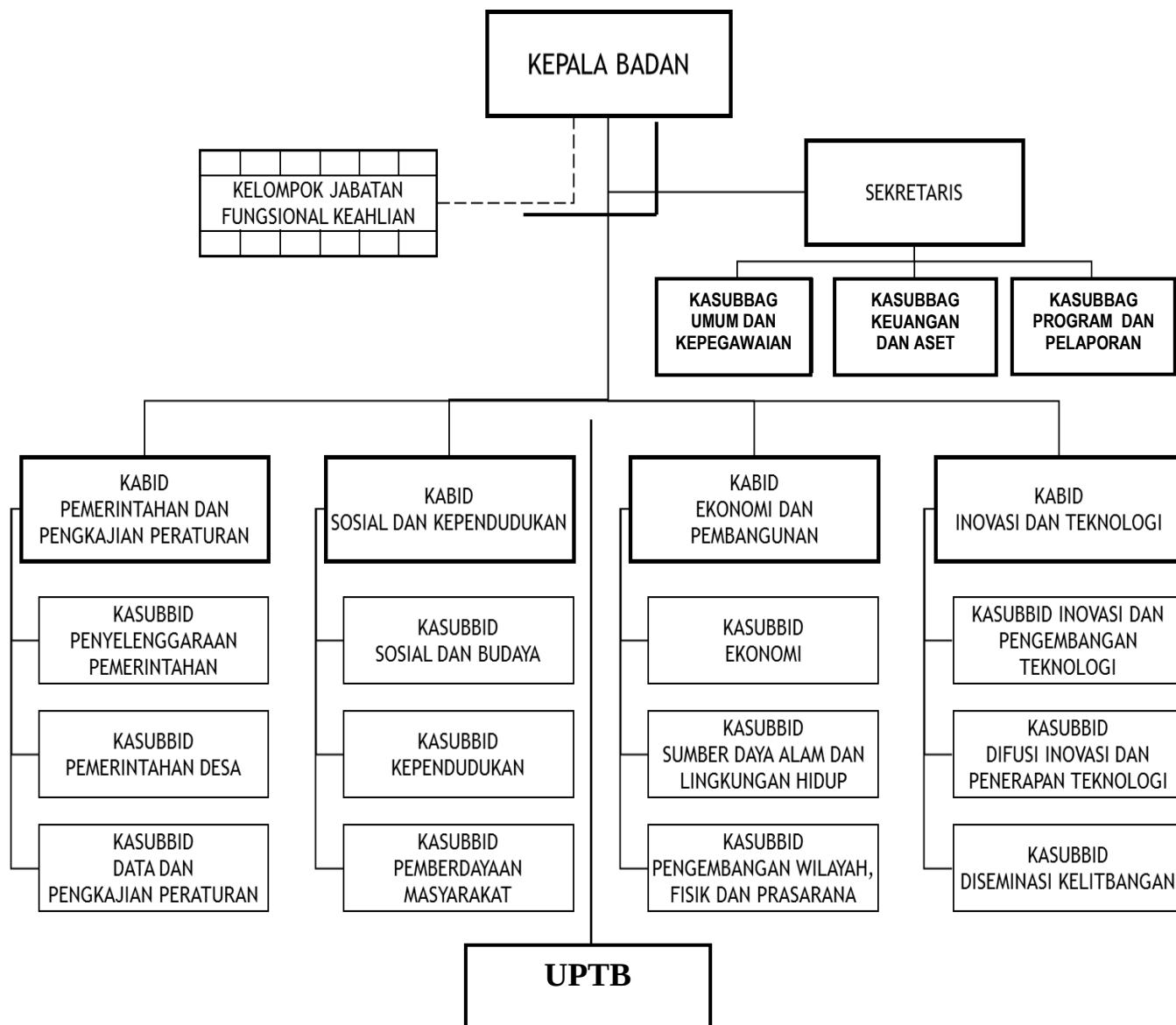
Dalam rangka pengembangan profesi, pejabat fungsional Pustakawan selain melaksanakan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya dapat juga melaksanakan tugas-tugas pengembangan profesi yang meliputi:

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi (PUSDOKINFO)
2. Menyusun pedoman/petunjuk teknis PUSDOKINFO
3. Menerjemahkan/menyadur buku-buku dan bahan lain di bidang PUSDOKINFO
4. Melakukan tugas sebagai Ketua kelompok /Koordinator Pustakawan atau memimpin unit Perpustakaan.
5. Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan.
6. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep.

Untuk optimalisasi kinerja kelembagaan Balitbangda Provinsi Jambi didukung oleh upaya peningkatan kapasitas penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan, ketatalaksanaan dan peningkatan kompetensi peneliti serta sumber daya manusia. Disamping itu sumber daya manusia pada Balitbangda Provinsi Jambi juga didukung oleh organisasi lain yang secara fungsional merupakan mitra Balitbangda Provinsi Jambi antara lain : Dewan Riset Daerah (DRD), Tim Evaluasi Kebijakan dan Program, Forum Komunikasi Kelitbang Daerah (FKKD), Operasional Jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda), Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Balitbangda Provinsi Jambi, Operasional Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sentra Promptek), Komisi Daerah Plasma Nutrafah (KDPN) Provinsi Jambi dan Penyebarluasan Hasil Litbang melalui Jurnal Khazanah Intelektual dan Gema Litbang, Perumusan Naskah Akademik, Pengkajian Perda serta Pergub.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Jambi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, dengan susunan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II (Kepala Badan), 4 pejabat eselon III (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang) dan 15 pejabat eselon I (3 Kasubbag dan 12 Kasubbid) dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

2.2. SUMBER DAYA BALITBANGDA

2.2.1. Susunan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Susunan Kepegawaian (Sumber Daya Manusia) yang ada pada Balitbangda Provinsi Jambi berdasarkan jabatan dan pendidikan terakhir disajikan pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan dan Pendidikan (orang)

Jabatan	Jumlah Pegawai					Total
	s/d SLTA	D3	S1	S2	S3	
Eselon II	-	-	-	1	-	1
Eselon III	-	-	1	2	2	5
Eselon IV	-	-	12	2		14
Peneliti	-	-	-	7	2	9
Kandidat Peneliti	-	-	-	-	-	-
Staf	11	-	18	8	1	38
Total	11	-	31	22	5	67

2.2.2. Perlengkapan dan Aset yang dikelola

Tabel 2.3.
Perlengkapan dan Aset yang dikelola Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016

No.	Nama Barang	Volume	Perkiraan Nilai (Rp)
1	Gedung Kantor	1 Unit	
2	Kendaraan roda 4	9 unit	1.665.362.500
3	Kendaraan roda 2	17 unit	241.184.830
4	Air Condioner (AC)	14 unit	96.861.000
5	Filling Kabinet	14 buah	178.419.204
6	Handycam	2 buah	14.200.000
7	Infocus	3 buah	10.150.000
8	Komputer	27 unit	233.453.560
9	Laptop	13 buah	173.550.000
10	Lemari kayu dan kaca	15 buah	39.497.310
11	Meja kerja	40 buah	86.190.290
12	Printer	19 buah	55.040.500

2.3. KINERJA PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN BALITBANGDA

2.3.1. Capaian Kinerja Yang Telah Dihasilkan Melalui Renstra Balitbangda Periode Sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan Balitbangda Provinsi Jambi pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.4. di bawah ini :

Tabel 2.4.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Balitbangda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase terlaksananya peningkatan hasil penelitian dan pengembangan oleh OPD terkait	--	-			25	50	65	70		100	100	100	100					
2	Prosentase terlaksananya peningkatan hasil produksi dalam mendukung daya saing daerah	--	-	--		25	50	65	70		100	100	100	100					
3	Prosentase terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan litbang dan diseminasi hasil-litbang	-				25	40	65	100		100	100	100	100					
4	Prosentase diterapkannya teknologi yang direkomendasikan dalam peningkatan nilai tambah usaha masyarakat	-				20	25	35	45		100	100	100	100					

2.3.2. Capaian Kinerja Antara Renstra Balitbangda dengan RPJMD Periode Sebelumnya

Tabel 2.5.

CAPAIAN KINERJA ANTARA RENSTRA DENGAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		Tahun 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	
1	Prosentase terlaksananya peningkatan hasil penelitian dan pengembangan oleh OPD terkait	0 %	0%	10%	15%	25%	35%	85%
2	Prosentase terlaksananya peningkatan hasil produksi dalam mendukung daya saing daerah	0%	0%	100%	100%	100%	100 %	100%
3	Prosentase terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan litbang dan diseminasi hasil-litbang	0%	0%	100%	100%	100%	100 %	100%
4	Prosentase diterapkannya teknologi yang direkomendasikan dalam peningkatan nilai tambah usaha masyarakat	0%	10%	10%	15%	25%	35%	85%

2.3.3. Hambatan dan Permasalahan yang perlu diantisipasi

Hambatan pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur :

1. Masih terdapat ego sektoral pada OPD yang kurang mendukung kebijakan penelitian yang dilakukan Balitbangda, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program;
2. Penelitian belum dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah, karena masih cenderung memakai kebijakan OPD yang tidak berdasarkan rekomendasi hasil penelitian Balitbangda;
3. Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh OPD lain, sehingga terjadi tumpang tindih kegiatan penelitian, hal ini karena belum dilakukan penelitian satu pintu.
4. Ketersediaan anggaran penelitian belum memadai, sehingga apabila ada kajian/penelitian terhadap isu aktual yang prioritas tidak dapat dilaksanakan; dan

5. Masih belum terbangunnya pola pikir analisis, metodologi dan empiris sebagian besar PNS Balitbangda khususnya Pejabat Fungsional dan fungsional umum

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BALITBANGDA

2.4.1. Tantangan

Optimalisasi peran Balitbangda sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat strategis dalam mensukseskan pelaksanaan urusan Konkraen yang meliputi 32 urusan dan menghadapi pasar bebas (MEA) tahun 2016, tantangan dalam pengembangan pelayanan Balitbangda, yaitu :

1. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
2. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pilar dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Kompleksnya permasalahan dan kebutuyhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2.4.2. Peluang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dan tanggung jawab Balitbangda Provinsi Jambi baik urusan wajib maupun pilihan meliputi :

1. Pemerintahan Umum
2. Otonomi daerah
3. Administrasi dan manajemen pemerintahan daerah
4. Kesatuan bangsa dan politik lokal
5. Penataan wilayah
6. Kependudukan dan catatan sipil
7. Pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
8. Pengelolaan pembangunan daerah
9. Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur
10. Bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Pemerintahan Provinsi

Berdasarkan posisi strategis, pada prinsipnya Balitbangda Provinsi Jambi berperan pada bidang formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Dengan demikian kegiatan Kelitbangan Daerah merupakan indikator kemajuan pengembangan dan pembangunan daerah. Optimalisasi program/kegiatan kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh intensitas koordinasi dan sinkronisasi antara OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerjasama ini menempatkan Balitbangda Provinsi Jambi sebagai koordinator, mediator dan fasilitator dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan rekomendasi arah kebijakan Pembangunan Daerah yang didukung oleh Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi.

Dalam rangka peningkatan daya saing masyarakat dalam menghadapi pasar bebas (MEA), kedepan Balitbangda Provinsi Jambi dapat memposisikan perannya sebagai penghubung, penyedia serta pengguna teknologi, inovasi dan katalisator kreatifitas

masyarakat dengan adanya kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Kabupaten/Kota, antar provinsi maupun pusat, Perguruan Tinggi setempat dan sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat pusat.

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi, maka peran Balitbangda Provinsi Jambi sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa permasalahan terkait dengan peran Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu :

1. Belum optimalnya implementasi rekomendasi hasil penelitian/kajian kegiatan kelitbangan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta;
2. Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan. Karena belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan; dan
3. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program-program kelitbangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) sebagai payung hukum pelaksanaan Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi
- Tersedianya Tenaga Peneliti
- Komitmen Pemerintah Daerah sudah mulai tumbuh

b. Kelemahan

- Sarana dan prasarana yang belum mendukung Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai lembaga riset.
- Kompetensi sebagai pejabat dan staf belum mendukung penguatan kinerja Balitbangda provinsi Jambi sebuah lembaga riset
- Masih terbatasnya dana untuk melaksanakan tupoksi

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Banyaknya permasalahan yang dulu diteliti/dikaji untuk masukan kebijakan daerah maupun permasalahan di masyarakat yang perlu diteliti/dikaji
- Dibukanya formasi Jabatan Fungsional Peneliti, Analis Kebijakan, Pranata Komputer dan lain-lain oleh pemerintah guna mendukung tupoksi Balitbangda, jaringan penelitian/kerjasama dengan *stakeholder* terkait tupoksi Balitbangda
- Perberlakuan MEA dan perjanjian pasar bebas regional maupun internasional lainnya mendorong lembaga riset berperan lebih aktif melakukan riset dan inovasi produk dan penrapan standarisasi.

b. Ancaman

- Hasil penelitian pihak luar yang kontradiktif dengan kebijakan daerah/kebutuhan masyarakat
- Persepsi yang kontradiktif/negatif oleh sebagian pihak kepada Lembaga Litbang/Riset

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Balitbangda
			Internal	Eksternal	
Penelitian dan Pengembangan	- Belum tersediannya data base pendukung penelitian - Hasil penelitian dan kajian tidak semuanya dapat diimplementasikan oleh Pemda dan masyarakat		- Sarana dan prasarana yang belum mendukung tupoksi balitbangda sebagai lembaga riset - Kompetensi sebagai pejabat, staf dan peneliti belum mendukung penguatan kinerja Balitbangda sebuah lembaga riset - Masih terbatasnya dana untuk melaksanakan tupoksi	- Hasil penelitian pihak luar yang kontradiktif dengan kebijakan daerah / kebutuhan masyarakat - Persepsi kontradiktif / negatif oleh sebagian pihak kepada lembaga Litbang/Riset	- Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dalam kegiatan penelitian dan pengembangan - Hasil penelitian /kajian tidak semuanya dapat diimplementasikan Pemda maupun masyarakat - Sistem informasi (website) tidak maksimal dalam menghadapi Pasar Bebas (MEA), Pemerintah telah melahirkan UU No.23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah yang akan mengubah peran Balitbangda bukan hanya mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan Kajian juga ditambah tugas untuk mengevaluasi dokumen perencanaan dan pelaporan.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan : Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Provinsi Jambi telah menetapkan Visi dalam menjalankan Pemerintahan dan Pembangunan, yaitu : **TERWUJUDNYA PROVINSI JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA.**

TERTIB	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis
UNGGUL	Meningkatkan kualitas SDM Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian
NYAMAN	Kehidupan masyarakat yang hidup dalam suasana aman, tentram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku, agama dan ras
TANGGUH	Kemandirian Ekonomi masyarakat, berkembangnya IPTEKIN serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
ADIL	Pembangunan yang adil dan merata tanpa diskriminasi baik individu, golongan maupun antar wilayah
SEJAHTERA	Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya

Adapun Misi yang ditetapkan dalam rangka mencapai Visi tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan bersetaraan gender
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesetaraan hukum
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan. .
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

Dari Visi dan Misi Jambi TUNTAS 2021 yang telah ditetapkan dimaksud, Balitbangda Provinsi Jambi dalam mendukung program kegiatan pembangunan menitikberatkan pada Misi ke 4 yakni *“Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan”*.

3.3. TELAAH RENSTRA K/L

3.3.1. Rencana Pembangunan Nasional

Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Visi itu dijalankan melalui delapan misi pembangunan. Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 tersebut sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Strategi untuk memantapkan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM. Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode sebelumnya. RPJM Nasional ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat.

Sesuai rumusan RPJM Tahun 2015-2019, telah ditetapkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Nasional yang kita sebut dengan **NAWA CITA** yang meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan Reformasi Sistem dan penegakan Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di Pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh Ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3.2. Visi Dan Misi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri RI

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri RI merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (RPJMN 2014-2019), sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025. Tahap kedua ketiga tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2015-2019 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan alat bantu dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2015-2019. Penyusunan Rencana strategis Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas “Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri” Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis, Program, dan Anggaran Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri.
2. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri
3. Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri
5. Pelaksanaan Fasilitasi Inovasi Daerah
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri
7. Pelaksanaan Administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Menteri.

Untuk itu, Visi masa depan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri RI akan difokuskan pada satu sasaran primer yaitu : kualitas hasil penelitian. Atas dasar pertimbangan tersebut, dan dalam rangka menunjang Visi Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yakni ***“Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintah Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”***

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Proses Awal dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Mendorong Inovasi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penelitian dan Daya Saing Daerah
3. Memantapkan Jejaring Penelitian antar Instansi Penelitian dan Pengembangan.
4. Memantapkan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.3.3. Visi Dan Misi Kementerian Ristek Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kemenristekdikti dan mencermati potret permasalahan-permasalahan yang ada, Kemenristekdikti menetapkan Visi ***“ Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang Bermutu serta Kemampuan Iptek dan Inovasi Untuk Mendukung Daya Saing Bangsa”***

Sebagai penjabaran lebih lanjut Visi dari Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses, relevansi dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

2. Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.

Tabel 3.2.
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap
Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kab/Kota	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Persentase rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>		Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> .	Meningkatkannya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri
2	1. Persentase Kelembagaan SIDA 2. Persentase Produk Unggulan yang Dihasilkan 3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan		Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
3	Persentase hasil publikasi yang mampu diakses masyarakat		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan kajian atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut serta telaahan Visi dan Misi Provinsi Jambi, maka berikut isu-isu strategis Balitbangda Provinsi Jambi :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh OPD maupun masyarakat;
Keberadaan Baltbangda Provinsi Jambi, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Jambi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah.
2. Sinkronisasi penelitian dengan kebutuhan pembangunan Provinsi Jambi;
Peran strategis yang diharapkan dari keberadaan institusi Litbang pada era otonomi daerah juga terkait dengan perannya dalam pembangunan Iptek di daerah adalah sebagai institusi Pemerintah Daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan Litbang. Koordinasi dan fasilitasi tersebut diperlukan

dalam rangka sinkronisasi, sinergi, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan Litbang di daerah.

3. Keterbatasan kompetensi staf, pejabat dan peneliti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi;
4. Pendanaan untuk penelitian belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jambi;
Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas/kecil. Minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Balitbangda Provinsi Jambi menjadikannya sulit berkembang.
5. Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan. Karena belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan; dan
6. Masih terbatasnya aktivitas riset yang mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.

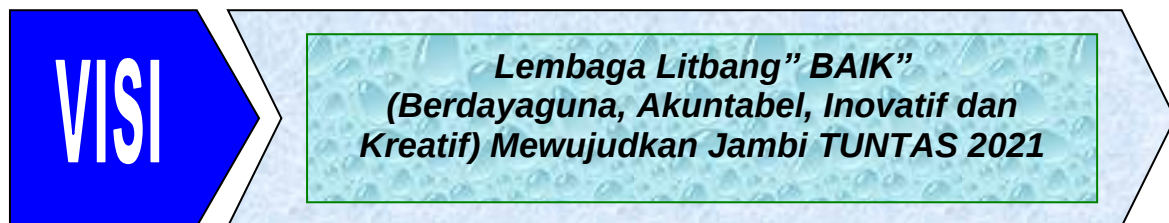
BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka Visi Balitbangda Provinsi Jambi untuk 5 (lima) kedepan yang ingin di capai adalah :



Berdayaguna	berkemampuan dalam memberikan hasil penelitian dan bermanfaat bagi masyarakat
Akuntabel	hasil penelitan dapat dipertanggungjawabkan baik sumber, proses dan hasilnya.
Inovatif	terus berinovasi, mencoba hal-hal baru bagi kemaslahatan orang banyak.
Kreatif	mampu menciptakan suatu yang baru baik berupa gagasan ataupun kebijakan.

Dari misi tersebut mengandung makna bahwa rekomendasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang direspon pemerintah daerah, melalui satuan kerja perangkat daerah dan *stakeholder* lain di wilayah Provinsi Jambi sebagai landasan setiap kebijakan dalam rangka untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi TUNTAS 2021.

4.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan tercapai dengan hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan

stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Balitbangda, adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder*.
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
3. Mendorong pemanfaatan iptekin dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu/permasalahan menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Biasanya identik dengan nama program.

Sehubungan dengan ditetapkan misi Balitbangda Provinsi Jambi di atas, maka tujuan strategis sebagai penjabaran dari misi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder*.
2. Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah dalam mendukung daya saing daerah.
3. Meningkatkan publikasi hasil penelitian.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dan ingin dicapai dari penyusunan Renstra. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan **Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder***, ditetapkan sasaran strategis, yaitu : T_1S_1 : Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan *Stakeholder*.
2. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah dalam mendukung daya saing daerah**, ditetapkan sasaran strategis, yaitu : T_2S_2 : Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya publikasi hasil penelitian**, yaitu : T_3S_3 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian.

Pencapaian sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Blitbangda Provinsi Jambi 2016-2021. Indikator sasaran perlu ditetapkan agar pencapaian sasaran strategis dapat lebih terukur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut lebih terarah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MISI 1 : Pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>								
1	Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>	Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> .	Persentase rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	70 %	75%	80%	80%	80%
MISI 2 : Penguatan Sistem Inovasi Daerah								
2	Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Daerah dalam mendukung daya saing daerah	Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	1. Persentase Kelembagaan SIDa	80%	80%	80%	80%	80%
			2. Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan	70%	75%	75%	75%	80%
			3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%

MISI 3 : Mendorong pemanfaatan Iptekin dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah								
3	Meningkatnya publikasi penelitian hasil	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil Penelitian	Persentase hasil publikasi yang mampu diakses masyarakat	60%	70%	70%	75%	80%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. Strategi

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:

1. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.
2. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui :
 - Penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan;
 - Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik.
4. Memberikan apresiasi pelaksanaan inovasi daerah kepada OPD dan masyarakat umum serta mahasiswa yang menemukan teknologi tepat guna.
5. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil Litbang.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelitbangan.
7. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbangan dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi.

4.3.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan strategi yang ditetapkan maka kebijakan pokok yang diambil oleh Balitbangda Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

1. Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas
2. Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan masyarakat.
3. Mengoptimalkan aspek-aspek pendukung guna peningkatan kualitas penyelenggaraan kelitbangan

Tabel 4.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Langkah Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B A I K	Pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>	Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>	Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Mendorong Pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas	1. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif. 2. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (<i>problem solving</i>) melalui pemanfaatan hasil Litbang. 3. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbangan dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi. 4. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (<i>policy paper</i>) dan risalah kebijakan (<i>policy brief</i>) kepada para pemangku kepentingan. 5. Mendorong pengembangan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kelitbangan antara lain : gedung, perpustakaan, website dan display inovasi, dan 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelitbangan.
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah.	Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Daerah dalam mendukung daya saing daerah	Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Memberikan apresiasi pelaksanaan inovasi daerah kepada OPD dan masyarakat umum serta mahasiswa yang mengembangkan teknologi tepat guna dan KTI. 2. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi dan Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi 3. Melaksanakan publikasi Lomba TTG dan KTI bentuk media cetak dan elektronik
	Mendorong pemanfaatan Iptekin dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil Penelitian	Menyebarkan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna	Penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD. Penyusunan program berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
8. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian program Balitbangda Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan nJasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
 - Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Makan dan Minum
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Alat Studio
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pengadaan Komputer
 - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Listrik dan elektronik
 - Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
 - Pembangunan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Korpri
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan OPD
 - Apresiasi Penataan Keuangan dan Pengelolaan Aset
- f. Program Penelitian dan Pengembangan
 - Penelitian Mandiri
 - Penelitian Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemerintahan Desa
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Data dan Pengkajian Peraturan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Ekonomi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid SDA dan Lingkungan Hidup
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Sosial Budaya
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemberdayaan Masyarakat

- Penelitian dan Pengembangan Subbid Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Diseminasi Kelitbang
- g. Program Penguatan Kelembagaan Litbang
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang
 - Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi (DRD)
 - Rakor dan Forum Kelitbang
 - Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi
 - Penerbitan Jurnal Litbang
 - Peningkatan Kompetensi Peneliti
 - Sumber Daya Genetik (SDG)
 - Diseminasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian
 - Seminar Nasional
 - Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal maupun Indikasi Geografis
- h. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
- Science Park di Provinsi Jambi
 - Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
 - Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK
 - Penerapan dan Pengembangan Citin Chitosan
 - Pengembangan Pusat Teknologi Reklamasi Lahan

Rincian program, kegiatan serta indikator disajikan dalam Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 5.1. di bawah ini.

**Tabel 5.1. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI**

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Program Pelayanan an Adiminis trasi Perkantoran Penyediaan surat menyurat	Jumlah surat keluar		78	8000 lbr	109	8000 lbr	120	8000 lbr	152	8000 lbr	214	8000 lbr	299	8.000 lbr	300	48.000 lbr	Balitbangda
			Penyedia an jasa komun ikasi Sumberdaya Air dan listrik	Periode pembayar an jasa komunikasi, air dan listrik		170	12 bulan	238	12 bulan	250	12 bulan	333	12 bulan	466	12 bulan	653	12 bulan	700	72 bulan	Balitbangda
			Penyedia an Jasa Admini strasi Keuangan	Jumlah Tenaga Adminis trasi Keuangan		135	12 bulan	189	12 bulan	200	12 bulan	264	12 bulan	370	12 bulan	518	12 bulan	600	72 bulan	Balitbangda
			Penyedia an Jasa Kebersih an Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan		120	1 paket	168	1 paket	190	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	500	6 paket	Balitbangda
			Penyedia an Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		40	47 jenis	56	47 jenis	112	47 jenis	156	47 jenis	219	47 jenis	307	47 jenis	400	262 jenis	Balitbangda
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perunda ng-undangan	Jumlah dan Jenis Buku		40	3 paket	56	3 paket	56	3 paket	60	3 paket	75	3 paket	80	3 paket	85	18 paket	Balitbangda
			Penyedia an Barang cetakan dan peng gandaan	Jumlah bahan peng gandaan dan cetakan		25	10 jenis	35	10 jenis	40	10 jenis	49	10 jenis	68	10 jenis	96	10 jenis	100	60 jenis	Balitbangda
			Penyedia an Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		12.000	1 paket	16	1 paket	20	1 paket	23	1 paket	32	1 paket	46	1 paket	50	6 paket	Balitbangda
			Penyedia an makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu		50	500 org	70	500 org	80	500 org	98	500 org	137	500 org	192	500 org	300	3000 org	Balitbangda
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksa na		400	35 kali	560	35 kali	650	35 kali	784	35 kali	1.097	35 kali	1.536	35 kali	1.600	210 kali	Balitbangda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2	Jumlah pengadaan dinas operasional		400	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	560	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	600	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	784	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.097,6	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.536,6	1 unit roda 2 unit roda 2	1.800	6 unit roda 12 unit roda 2	Balitbangda

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor		135	1 paket	189	1 paket	200	1 paket	264	1 paket	370	1 paket	518	1 paket	600	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan peralatan gedung/ kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor		58	1 paket	81	1 paket	90	1 paket	113	1 paket	159	1 paket	222	1 paket	300	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan mebeleur	Jumlah /jenis pengadaan mebeleur		45	1 paket	63	1 paket	70	1 paket	88	1 paket	123	1 paket	172	1 paket	200	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan Alat Studio	Jumlah /jenis pengadaan Alat Studio		50	1 paket	65	1 paket	75	1 paket	89	1 paket	120	1 paket	170	1 paket	200	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer, laptop dan printer.		120	1 paket	168	1 paket	180	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	600	6 paket	Balitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung /kantor	Jumlah unit kantor		250	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	490	1 paket	686	1 paket	960	1 paket	1.000	6 paket	Balitbangda
			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara		450	1 ta hun	630	1 ta hun	700	1 tahun	882	1 tahun	1.234	1 tahun	1.728	1 tahun	1.900	6 tahun	Balitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan listrik dan elektronik	Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang terpelihara		32.000	1 ta hun	44.800	1tahun	50.000	1 tahun	62.720	1 tahun	87.808	1 tahun	122.931	1 tahun	1.500	6 tahun	Balitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pedrlengkapan gedung kantor yang terpelihara		250	1 tahun	350	1 ta hun	400	1 tahun	490	1 tahun	686	1 tahun	960	1 tahun	1.200	6 tahun	Balitbangda
			Pemeliharaan Berkala rutin peralatan gedung kantor	Jumlah /jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		100	1 ta hun	140	1 ta hun	160	1 tahun	196	1 tahun	274	1 tahun	384	1 tahun	500	6 tahun	Balitbangda
			Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhab		3.000	1 ta hun	4.200	1 paket	5.000	1 paket	5.880	1 paket	8.232	1 paket	11.524	1 paket	15.000	6 paket	Balitbangda
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		1.000	1 paket	2.500	1 paket	3.500	1 paket	5.500	1 paket	6.000	1 paket	15.000	1 paket	18.000	6 paket	Balitbangda

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Pengadaan Peralatan Inkubator	Jumlah Mesin Inkubator		175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	Balitbangda
			Pengadaan Mesin Penggiling Karet	Jumlah Penggiling Karet		125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	Balitbangda
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng kapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertetu		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/ bintek		200	4 org	280	4 org	300	4 org	392	4 org	548	4 org	768	4 org	900	24 org	Balitbangda
			Program Penelitian dan Pengembangan Litbang Subbid Ekonomi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid SDA dan Lingk. Hidup	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pengembangan Wilayah, Fisikdan Prasarana	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda

			Litbang Subbid Sosial dan Budaya	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Kependudukan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Penyeenggaraan Pemerintahan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pemerintahan Desa	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Inovai dan Pengemb. Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Difusi Inovai dan Penerapan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Penelitian Mandiri	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Penelitian Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Rakor dan Forum Kelitbangan	Jumlah Rakor yang dilaksanakan		250	2 kali	350	2 kali	400	2 kali	490	2 kali	686	2 kali	960	2 kali	1.100	12 kali	Balitbangda
			Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Kinerja Balitbangda	Jumlah laporan kinerja hasil litbang		250	12 buku	300	12 buku	330	12 buku	375	12 buku	521	12 buku	729	12 buku	850	72 buku	
			Dewan Riset Daerah (DRD)	Jumlah rekomendasi yang		450	1 Reko	630	1 Reko	700	1 Reko	882	1 Reko	1.234	1 Reko	1.728	1 Reko	1.900	6 Reko	Balitbangda

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021					
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
				disusun			mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		
		Penerbitan Jurnal Litbang	Jumlah Jurnal yang terbit		250	3 kali terbit	300	3 kali terbit	350	3 kali terbit	392	3 kali terbit	548	3 kali terbit	768	3 kali terbit	800	18 kali terbit	Balitbangda
		Peningkatan Kompetensi Peneliti	Jumlah seminar, lokakarya,workshop yang diuikti		300	5 Orang	357	5 orang	400	5 orang	499	5 orang	699	5 orang	979	5 Orang	1.100	30 Orang	Balitbangda
		Penguatan Jaringan penelitian di Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama		400	1Kerjasama	560	1Kerjasama	600	1Kerjasama	784	1Kerjasama	1.096	1 Kerja sama	1.600	1 Kerjasama	1.750	6 Kerjasama	Balitbangda
		Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Kelembagaan Intelektual (HKI) Produk Unggulan Provinsi Jambi	Jumlah Buku Persyaratan IG		224	1 Buku Persyaratan IG	490	1 Buku Persyaratan IG	550	1 Buku Persyaratan IG	686	1 Buku Persyaratan IG	960	1 Buku Persyaratan IG	1.344	1 Buku Persyaratan IG	1.900	6 Buku Persyaratan IG	Balitbangda
		Diseminasi Dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Jumlah Pertemuan		257	4 Pertemuan	359	4 Pertemuan	400	4 Pertemuan	503	4 Pertemuan	705	4 Pertemuan	987	4 pertemuan	1.050	24 pertemuan	Balitbangda
		Sumber Daya Genetik Produk Unggulan	Jumlah Buku Khasanah IG		175	1 kali sosialisasi	245	1 kali sosialisasi	245	1 kali sosialisasi	300	1 kali sosialisasi	480	1 kali sosialisasi	660	1 kali sosialisasi	800	6 kali sosialisasi	Balitbangda
		Seminar Nasional	Jumlah judul yang diseminarkan		125	10 Judul	140	10 Judul	150	10 Judul	165	10 Judul	185	10 Judul	200	10 Judul	500	60 Judul	Balitbangda
		Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Roadmap SIDA		200	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	280	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	300	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	392	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	548	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	768	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 3 Inovasi OPD	900	6 Roadmap SIDA di Kab/Kota dan 3 Inovasi OPD	Balitbangda
		Science Park	Jumlah SP		2.700	1 Pembangunan an Fisik	3.780	1 Pembangunan an Fisik	4.000	1 Pembangunan an Fisik	5.292	1 Pembangunan an Fisik	7.408	1 Pembangunan an Fisik	10.372	1 Pembangunan an Fisik	12.000	1 Pembangunan an Fisik	Balitbangda
		Pengembangan Pusat Tekno logi Reklamasi Lahan	Jumlah Laporan Reklamasi lahan		198	1 Reko mendasi	350	1 Reko mendasi	360	1 Reko mendasi	388	1 Reko mendasi	543	1 Reko mendasi	760	1 Reko mendasi	900	6 Reko mendasi	Balitbangda
		Pengembangan Sentra Promosi IPTEK	Jumlah inovasi teknologi yang dihasilkan		350	6 TTG 12 KTI	490	6 TTG 12 KTI	550	6 TTG 12 KTI	686	6 TTG 12 KTI	960	6 TTG 12 KTI	1.344	6 TTG 12 KTI	1.500	36 TTG 72 KTI	Balitbangda
		Penerapan & Pengembangan Chitin Chitosan	Jumlah Pelatihan Pembuatan Chitin-Chitosan		125	1 kali	130	1 kali	135	1 kali	145	1 kali	175	1 kali	200	1 kali	500	5 kali	Balitbangda

Tabel 5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI

Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K o d e	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Optimalisasi Pendayagu naan Rekomenda si hasil Kelitbangan oleh Stakeholder	Meningkatnya Rekomendasi yang diaplikasikan Stakeholder	Persentase Reko-mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		Penelitian dan Pengemba ngan Litbang Subbid Ekonomi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid SDA dan Lingk. Hidup	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Pengemba- ngan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indikator Sasa ran	K o d e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Litbang Subbid Pemerintaha n dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Penyelengga an Pemerintaha n	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Data dn Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
				Litbang Subbid Inovai dan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Pengembang an Inovai dan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litban Subbid Sosial dan Budaya	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekom endasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Kependuduk	Jumlah Reko mendasi yang		1.200	1 Rekomen	1.400	1 Rekom	1.600	1 Rekome	1.960	1 Rekom	2.744	1 Rekome	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
				an	diaplikasikan Stakeholder			dasi		endasi		ndasi		endasi		ndasi				
				Litbang Subbid Pemberdaya anMasyarkat	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekom endasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Peneliti Mandiri	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Peneliti Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
2.Meningkatka n Inovasi dan Teknologi Daerah dalam	Meningkatn ya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk	1. Persent ase Kelemb agaan SIDa		Pengembang an Inovasi dan Teknologi Daerah Sistem	1. Roadmap SIDA		200	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	280	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	300	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	392	1 Roadma p SIDA di Kab/Kot a	548	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	768	6 Roadma p SIDA	Balitbang da	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
Mendukung Daya Saing Daerah	Unggulan dan meningkatn ya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptaka n Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	2. Persent ase Produk Unggula n yang terlindun gi		Inovasi Daerah Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembanga n Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Kelembagaan Intelektual (HKI) Produk Unggulan Provinsi Jambi	2. Jumlah Buku Persyarat an IG		224	1 Buku Persyarat an IG	490	1 Buku Persyarat an IG	550	1 Buku Persyarat an IG	686	1 Buku Persyar atan IG	960	1 Buku Persyarat an IG	1.344	6 Buku Persyarat an IG	Balitbang da	
		3. Persent ase KTI dan Teknolo gi Tepat Guna		Pengembang an Inovasi dan Teknologi Daerah	3. Jumlah Inovasi teknologi yang dihasilkan		350.000	6 TTG 12 KTI	490.000	6 TTG 12 KTI	550.000	6 TTG 12 KTI	686.000	6 TTG 12 KTI	960.400	6 TTG 12 KTI	1.344	36 TTG 72 KTI	Balitbang da	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		(TTG) yang dihasilkan		Pengembang an Sentra Promosi IPTEK																
3.Meningkatnya publikasi hasil penelitian	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil Penelitian	Persentase hasil publikasi yang mampu diakses masyarakat		Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Penerbitan Jurnal Litbang	Jumlah Jurnal yang Terbit		250	3 kali terbit	300	3 kali terbit	350	3 kali terbit	392	3 kali terbit	548	3 kali terbit	768	18 kali terbit		

BAB 6

INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2016-2021 tahun 2017 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi disusun dapat diukur melalui indikator kinerja dari sasaran. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah Indikator Kinerja Balitbangda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Jumlah Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang tertuang pada Renstra sebelum direvisi sebanyak 3 (tiga) indikator. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, mulai tahun 2018 Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi berubah menjadi : Jumlah Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi ditetapkan yang sesuai dengan TUPOKSI serta dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Jambi sesuai RPJMD Jambi yang telah direvisi menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. di bawah ini.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Balitbangda yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rekomendasi yang diaplikasikan Stakeholder	85%	70 %	75%	80%	80%	80%	80%	75%
2	1. Persentase Kelembagaan SIDA	0	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	2. Persentase Produk Unggulan yang		70%	75%	75%	75%	80%	70%	75%

	dihasilkan 3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase hasil publikasi yang mampu diakses masyarakat	0	60%	70%	70%	75%	80%	80%	80%

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplemntasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD. Penyusunan program berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Balirbvangda Provinsi Jambi.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dalam kurun waktu Rahun 2016-2021 antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantaron
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
8. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan begian program Balitbangda Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan nJasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
 - Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Makan dan Minum
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Alat Studio
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pengadaan Komputer
 - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Listrik dan elektronik
 - Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
 - Pembangunan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Korpri
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan OPD
 - Apresiasi Penataan Keuangan dan Pengelolaan Aset
- f. Program Penelitian dan Pengembangan
 - Penelitian Mandiri
 - Penelitian Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemerintahan Desa
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Data dan Pengkajian Peraturan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Ekonomi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid SDA dan Lingkungan Hidup
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Sosial Budaya
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemberdayaan Masyarakat

- Penelitian dan Pengembangan Subbid Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Disemninas Kelitbangan
- g. Program Penguatan Kelembagaan Litbang
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang
 - Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi (DRD)
 - Rakor dan Forum Kelitbangan
 - Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi
 - Penerbitan Jurnal Litbang
 - Peningkatan Kompetensi Peneliti
 - Sumber Daya Genetik (SDG)
 - Diseminasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian
 - Seminar Nasional
 - Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal maupun Indikasi Geografis
- h. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
- Science Park di Provinsi Jambi
 - Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
 - Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK
 - Penerapan dan Pengembangan Citin Chitosan
 - Pengembangan Pusat Teknologi Reklamasi Lahan

Rincian program, kegiatan serta indikator disajikan dalam Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 5.1. di bawah ini.

Tabel 5.1. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Program Pelayan an Adiminis trasi Perkantoran Penyediaan surat menyurat	Jumlah surat keluar		78	8000 lbr	109	8000 lbr	120	8000 lbr	152	8000 lbr	214	8000 lbr	299	8.000 lbr	300	48.000 lbr	Balitbangda
			Penyedia an jasa komun ikasi Sumberdaya Air dan listrik	Periode pembayar an jasa komunikasi, air dan listrik		170	12 bulan	238	12 bulan	250	12 bulan	333	12 bulan	466	12 bulan	653	12 bulan	700	72 bulan	Balitbangda
			Penyedia an Jasa Admini strasi Keuangan	Jumlah Tenaga Adminis trasi Keuangan		135	12 bulan	189	12 bulan	200	12 bulan	264	12 bulan	370	12 bulan	518	12 bulan	600	72 bulan	Balitbangda
			Penyedia an Jasa Kebersih an Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan		120	1 paket	168	1 paket	190	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	500	6 paket	Balitbangda
			Penyedia an Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		40	47 jenis	56	47 jenis	112	47 jenis	156	47 jenis	219	47 jenis	307	47 jenis	400	262 jenis	Balitbangda
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perunda ng-undangan	Jumlah dan Jenis Buku		40	3 paket	56	3 paket	56	3 paket	60	3 paket	75	3 paket	80	3 paket	85	18 paket	Balitbangda
			Penyedia an Barang cetakan dan peng gandaan	Jumlah bahan peng gandaan dan cetakan		25	10 jenis	35	10 jenis	40	10 jenis	49	10 jenis	68	10 jenis	96	10 jenis	100	60 jenis	Balitbangda
			Penyedia an Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		12.000	1 paket	16	1 paket	20	1 paket	23	1 paket	32	1 paket	46	1 paket	50	6 paket	Balitbangda
			Penyedia an makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu		50	500 org	70	500 org	80	500 org	98	500 org	137	500 org	192	500 org	300	3000 org	Balitbangda
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksa na		400	35 kali	560	35 kali	650	35 kali	784	35 kali	1.097	35 kali	1.536	35 kali	1.600	210 kali	Balitbangda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2	Jumlah pengadaan dinas operasional		400	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	560	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	600	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	784	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.097,6	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.536,6	1 unit roda 2 unit roda 2	1.800	6 unit roda 12 unit roda 2	Balitbangda

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor		135	1 paket	189	1 paket	200	1 paket	264	1 paket	370	1 paket	518	1 paket	600	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan peralatan gedung/ kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor		58	1 paket	81	1 paket	90	1 paket	113	1 paket	159	1 paket	222	1 paket	300	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan mebeleur	Jumlah /jenis pengadaan mebeleur		45	1 paket	63	1 paket	70	1 paket	88	1 paket	123	1 paket	172	1 paket	200	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan Alat Studio	Jumlah /jenis pengadaan Alat Studio		50	1 paket	65	1 paket	75	1 paket	89	1 paket	120	1 paket	170	1 paket	200	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer, laptop dan printer.		120	1 paket	168	1 paket	180	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	600	6 paket	Balitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung /kantor	Jumlah unit kantor		250	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	490	1 paket	686	1 paket	960	1 paket	1.000	6 paket	Balitbangda
			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara		450	1 ta hun	630	1 ta hun	700	1 tahun	882	1 tahun	1.234	1 tahun	1.728	1 tahun	1.900	6 tahun	Balitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan listrik dan elektronik	Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang terpelihara		32.000	1 ta hun	44.800	1tahun	50.000	1 tahun	62.720	1 tahun	87.808	1 tahun	122.931	1 tahun	1.500	6 tahun	Balitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pedrlengkapan gedung kantor yang terpelihara		250	1 tahun	350	1 ta hun	400	1 tahun	490	1 tahun	686	1 tahun	960	1 tahun	1.200	6 tahun	Balitbangda
			Pemeliharaan Berkala rutin peralatan gedung kantor	Jumlah /jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		100	1 ta hun	140	1 ta hun	160	1 tahun	196	1 tahun	274	1 tahun	384	1 tahun	500	6 tahun	Balitbangda
			Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhab		3.000	1 ta hun	4.200	1 paket	5.000	1 paket	5.880	1 paket	8.232	1 paket	11.524	1 paket	15.000	6 paket	Balitbangda
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		1.000	1 paket	2.500	1 paket	3.500	1 paket	5.500	1 paket	6.000	1 paket	15.000	1 paket	18.000	6 paket	Balitbangda

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Pengadaan Peralatan Inkubator	Jumlah Mesin Inkubator		175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	Balitbangda
			Pengadaan Mesin Penggiling Karet	Jumlah Penggiling Karet		125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	Balitbangda
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng kapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertetu		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/ bintek		200	4 org	280	4 org	300	4 org	392	4 org	548	4 org	768	4 org	900	24 org	Balitbangda
			Program Penelitian dan Pengembangan Litbang Subbid Ekonomi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid SDA dan Lingk. Hidup	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pengembangan Wilayah, Fisikdan Prasarana	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda

			Litbang Subbid Sosial dan Budaya	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Kependudukan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Penyeenggaraan Pemerintahan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pemerintahan Desa	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Inovai dan Pengemb. Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Difusi Inovai dan Penerapan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Penelitian Mandiri	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Penelitian Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Rakor dan Forum Kelitbangan	Jumlah Rakor yang dilaksanakan		250	2 kali	350	2 kali	400	2 kali	490	2 kali	686	2 kali	960	2 kali	1.100	12 kali	Balitbangda
			Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Kinerja Balitbangda	Jumlah laporan kinerja hasil litbang		250	12 buku	300	12 buku	330	12 buku	375	12 buku	521	12 buku	729	12 buku	850	72 buku	
			Dewan Riset Daerah (DRD)	Jumlah rekomendasi yang		450	1 Reko	630	1 Reko	700	1 Reko	882	1 Reko	1.234	1 Reko	1.728	1 Reko	1.900	6 Reko	Balitbangda

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021					
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
				disusun			mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		
		Penerbitan Jurnal Litbang	Jumlah Jurnal yang terbit		250	3 kali terbit	300	3 kali terbit	350	3 kali terbit	392	3 kali terbit	548	3 kali terbit	768	3 kali terbit	800	18 kali terbit	Balitbangda
		Peningkatan Kompetensi Peneliti	Jumlah seminar, lokakarya,workshop yang diuikti		300	5 Orang	357	5 orang	400	5 orang	499	5 orang	699	5 orang	979	5 Orang	1.100	30 Orang	Balitbangda
		Penguatan Jaringan penelitian di Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama		400	1Kerjasama	560	1Kerjasama	600	1Kerjasama	784	1Kerjasama	1.096	1 Kerja sama	1.600	1 Kerjasama	1.750	6 Kerjasama	Balitbangda
		Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Kelembagaan Intelektual (HKI) Produk Unggulan Provinsi Jambi	Jumlah Buku Persyaratan IG		224	1 Buku Persyaratan IG	490	1 Buku Persyaratan IG	550	1 Buku Persyaratan IG	686	1 Buku Persyaratan IG	960	1 Buku Persyaratan IG	1.344	1 Buku Persyaratan IG	1.900	6 Buku Persyaratan IG	Balitbangda
		Diseminasi Dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Jumlah Pertemuan		257	4 Pertemuan	359	4 Pertemuan	400	4 Pertemuan	503	4 Pertemuan	705	4 Pertemuan	987	4 pertemuan	1.050	24 pertemuan	Balitbangda
		Sumber Daya Genetik Produk Unggulan	Jumlah Buku Khasanah IG		175	1 kali sosialisasi	245	1 kali sosialisasi	245	1 kali sosialisasi	300	1 kali sosialisasi	480	1 kali sosialisasi	660	1 kali sosialisasi	800	6 kali sosialisasi	Balitbangda
		Seminar Nasional	Jumlah judul yang diseminarkan		125	10 Judul	140	10 Judul	150	10 Judul	165	10 Judul	185	10 Judul	200	10 Judul	500	60 Judul	Balitbangda
		Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Roadmap SIDA		200	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	280	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	300	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	392	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	548	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	768	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 3 Inovasi OPD	900	6 Roadmap SIDA di Kab/Kota dan 3 Inovasi OPD	Balitbangda
		Science Park	Jumlah SP		2.700	1 Pembangunan an Fisik	3.780	1 Pembangunan an Fisik	4.000	1 Pembangunan an Fisik	5.292	1 Pembangunan an Fisik	7.408	1 Pembangunan an Fisik	10.372	1 Pembangunan an Fisik	12.000	1 Pembangunan an Fisik	Balitbangda
		Pengembangan Pusat Tekno logi Reklamasi Lahan	Jumlah Laporan Reklamasi lahan		198	1 Reko mendasi	350	1 Reko mendasi	360	1 Reko mendasi	388	1 Reko mendasi	543	1 Reko mendasi	760	1 Reko mendasi	900	6 Reko mendasi	Balitbangda
		Pengembangan Sentra Promosi IPTEK	Jumlah inovasi teknologi yang dihasilkan		350	6 TTG 12 KTI	490	6 TTG 12 KTI	550	6 TTG 12 KTI	686	6 TTG 12 KTI	960	6 TTG 12 KTI	1.344	6 TTG 12 KTI	1.500	36 TTG 72 KTI	Balitbangda
		Penerapan & Pengembangan Chitin Chitosan	Jumlah Pelatihan Pembuatan Chitin-Chitosan		125	1 kali	130	1 kali	135	1 kali	145	1 kali	175	1 kali	200	1 kali	500	5 kali	Balitbangda

Tabel 5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI

Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K o d e	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Optimalisasi Pendayagu naan Rekomenda si hasil Kelitbangan oleh Stakeholder	Meningkatnya Rekomendasi yang diaplikasikan Stakeholder	Persentase Reko-mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		Penelitian dan Pengemba ngan Litbang Subbid Ekonomi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid SDA dan Lingk. Hidup	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Pengemba- ngan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indikator Sasa ran	K o d e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Litbang Subbid Pemerintaha n dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Penyelengga an Pemerintaha n	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Data dn Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
				Litbang Subbid Inovai dan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Pengembang an Inovai dan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litban Subbid Sosial dan Budaya	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekom endasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Kependuduk	Jumlah Reko mendasi yang		1.200	1 Rekomen	1.400	1 Rekom	1.600	1 Rekome	1.960	1 Rekom	2.744	1 Rekome	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
				an	diaplikasikan Stakeholder			dasi		endasi		ndasi		endasi		ndasi				
				Litbang Subbid Pemberdaya anMasyarkat	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekom endasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Peneliti Mandiri	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Peneliti Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
2.Meningkatka n Inovasi dan Teknologi Daerah dalam	Meningkatn ya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk	1. Persent ase Kelemb agaan SIDa		Pengembang an Inovasi dan Teknologi Daerah Sistem	1. Roadmap SIDA		200	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	280	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	300	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	392	1 Roadma p SIDA di Kab/Kot a	548	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	768	6 Roadma p SIDA	Balitbang da	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
Mendukung Daya Saing Daerah	Unggulan dan meningkatn ya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptaka n Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	2. Persent ase Produk Unggula n yang terlindun gi		Inovasi Daerah Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembanga n Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Kelembagaan Intelektual (HKI) Produk Unggulan Provinsi Jambi	2. Jumlah Buku Persyarat an IG		224	1 Buku Persyarat an IG	490	1 Buku Persyarat an IG	550	1 Buku Persyarat an IG	686	1 Buku Persyar atan IG	960	1 Buku Persyarat an IG	1.344	6 Buku Persyarat an IG	Balitbang da	
		3. Persent ase KTI dan Teknolo gi Tepat Guna		Pengembang an Inovasi dan Teknologi Daerah	3. Jumlah Inovasi teknologi yang dihasilkan		350.000	6 TTG 12 KTI	490.000	6 TTG 12 KTI	550.000	6 TTG 12 KTI	686.000	6 TTG 12 KTI	960.400	6 TTG 12 KTI	1.344	36 TTG 72 KTI	Balitbang da	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		(TTG) yang dihasilkan		Pengembang an Sentra Promosi IPTEK																
3.Meningkatnya publikasi hasil penelitian	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil Penelitian	Persentase hasil publikasi yang mampu diakses masyarakat		Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Penerbitan Jurnal Litbang	Jumlah Jurnal yang Terbit		250	3 kali terbit	300	3 kali terbit	350	3 kali terbit	392	3 kali terbit	548	3 kali terbit	768	18 kali terbit		